



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 245-06-19PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPR, DPRD 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

RABU, 10 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 245-06-19PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan DPD 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur

PEMOHON:

1. Partai Beringin Karya (Perkara Nomor 217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Bulan Bintang (Perkara Nomor 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Hati Nurani (Perkara Nomor 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Perkara Nomor 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Rabu, 10 Juli 2019, Pukul 08.18 – 09.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Haifa Arief Lubis
A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Jou Hasyim Waimahing

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Irfan Maulana Muharam
2. Afrizal

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. M. Maulana Bungaran
2. Ali Antonius
3. Ferdinandus Himan

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Yulius Nifran Mulisan Mbau

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Saleh Kabakoran
2. Akbar Budi Setiawan
3. M. Ishak Ramadan Lating

F. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari (Anggota KPU RI)
2. Thomas Dohu (KPU NTT)

G. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ali Nurdin
2. Absar Kartabrata
3. Anton Suparman
4. Zahru Arqam
5. Moh. Agus Riza
6. Bagus Setiawan
7. RD. Liani Afrianty
8. Irwansyah

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Andi Syamsul Bahri
2. Erfandi

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ridwan Darmawan
2. Fetty Anggraenidini
3. Adrianus Agal

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Herdika Sukma Negara
2. Adrianus Agal
3. Fetty Anggraenidini

K. Badan Pengawas Pemilu:

1. Thomas
2. Rahmat Bagja
3. Melpi Marpaung
4. Jemris
5. Bella

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.18 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat Pagi. Om Swastiastu.

Sidang hari kedua untuk pileg, ya. Ada 6 perkara untuk sesi pertama ini, yaitu Perkara Nomor 217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Ya, kita mulai dari Perkara Nomor 217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Silakan Pemohon memperkenalkan diri siapa yang hadir untuk Perkara Nomor 217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

Enggak ada, ya? Oh, ya, Partai Berkarya tidak ada. Perkara Nomor 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari PAN? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya,

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Assalamualaikum wr. wb. Salam Sejahtera untuk kita semua.

Perkenalkanlah saya, Jou Hasyim Waimahing dari Partai Amanat Nasional. Dalam hal ini, bertindak untuk mewakili Partai Amanat Nasional untuk Dapil NTT III, Kabupaten Lembata.

Izinkan kami membacakan permohonan.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti. Perkenalan dulu. Ya, cukup ya.
Kemudian, Perkara Nomor 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Silakan, PBB.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA MUHARAM (PBB)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Perkenalkan, kami selaku Kuasa Hukum dari PBB (Partai Bulan Bintang). Kami bersama rekan, saya sendiri Irfan Maulana dan rekan saya Afrizal mewakili untuk permohonan untuk Dapil Arol ... Alor IV Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kemudian Perkara Nomor 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Gerindra, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Terima kasih, Yang Mulia.
Dari Partai Gerindra yang hadir saat ini saya Ali Antonius, S.H., M.H., di sebelah kiri saya Maulana Bungaran, S.H, dan di sampingnya Ferdinandus Himan, S.H.
Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Selanjutnya, Perkara Nomor 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Hanura.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Assalamualaikum wr. wb. Selamat Pagi.
Terima kasih, Yang Mulia. Kita dari Perkara Nomor 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari DPP Partai Hanura. Saya sendiri Hamka dan di samping kanan saya Prinsipal, Pak Yulius Nifran Mbau.
Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya terakhir, Perkara Nomor 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Garuda.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan kami dari Kuasa Pemohon Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda. Kebetulan saya sendiri, Saleh Kabakoran, Yang Mulia, didampingi oleh 2 rekan atas nama Akbar Budi Setiawan dan Muhammad Ishak Ramadan Lating, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Selanjutnya, Termohon, silakan.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Dari Termohon hadir dari KPU Provinsi NTT, Pak Ketua, Pak Thomas. Kemudian ada dari sekretariat, Pak Anton Suparman dan Pak Irawan. Dari Kuasa Hukum, saya sendiri Ali Nurdin dari Kantor Ali Nurdin And Partners untuk Partai PAN dan Partai Berkarya bersama dengan Pak Riza Hufaidah. Kemudian, ada dari kantor Pak Absar Kartabrata, Pak Absar dan Ibu Liani Afrianty untuk Partai Gerindra dan Hanura, serta Pak Zahru Arqam dan Bagus Setiawan dari HICON untuk Partai Garuda dan PDIP, PKB, PBB.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Bawaslu?

16. BAWASLU: RAHMAT BAGJA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Mohon izin, Yang Mulia. Kami perkenalkan dari Bawaslu Republik Indonesia, Anggota Rahma Bagja dari Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu NTT, Bapak Thomas. Anggota Bawaslu NTT, Pak Jemris dan Ibu Melpi di belakang, dan serta staf dari bagian hukum, Bella.

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Dari Pihak Terkait yang hadir? Silakan. Ada Perkara Nomor 217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak ada, ya? Baik. Perkara Nomor 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak ada. Perkara Nomor 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDI SYAMSUL BAHRI (PPP)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami memperkenalkan diri bahwa kami dari Kuasa Hukum Partai Persatuan Pembangunan. Saya sendiri, Andi Syamsul Bahri dan rekan Erfandi ada di pojok kanan ... eh ... belakang.

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih.

Perkara Nomor 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159-02-19, 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ADRIANUS AGAL (GOLKAR)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pihak Terkait Perkara 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Golkar.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Golkar, ya?

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159-02-19, 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ADRIANUS AGAL (GOLKAR)

Perkenalkan saya, Adrianus Agal, S.H., Rekan saya Fetty Anggraenidini, S.H., dan Herdika Sukma Negara, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Nomor 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak ada? Baik. Nomor 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak ada juga? Ya, baik. ya.

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN (PDIP)

Izin, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dari PDI Perjuangan. Saya mewakili (...)

25. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, iya. Tadi dipanggil, ya. Ya, silakan!

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN (PDIP)

Ya. Saya mewakili PDIP, Ridwan Darmawan, S.H.
Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Tadi kok enggak ini (...)

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN (PDIP)

Tadi di sebelah ada Golkar juga.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kan ada dua memang. Golkar sama PDIP.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN (PDIP)

Ya, betul.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, toh?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN (PDIP)

Betul, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Seharusnya habis Golkar tadi langsung (...)
Ya, enggak apa-apa.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN (PDIP)

Ya, baik.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Tapi lain kali langsung, habis yang ... kebetulan ada dua memang.
Ya. Baik, silakan, Yang Mulia!

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERDIKA SUKMA NEGARA (GOLKAR)

Izin, Yang Mulia?

37. KETUA: ANWAR USMAN

Lho masih ada?

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERDIKA SUKMA NEGARA (GOLKAR)

Ya. Untuk Perkara Nomor 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019,
Yang Mulia?

39. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

245 (...)

40. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi kan udah dipanggil, ngobrol sih!

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERDIKA SUKMA NEGARA (GOLKAR)

Ya. Sebagai (...)

42. KETUA: ANWAR USMAN

Makanya disidang tuh jangan ngobrol, saya lihat tadi (...)

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERDIKA SUKMA NEGARA (GOLKAR)

Ya, Mohon maaf, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Kok sidang enggak serius ini?

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERDIKA SUKMA NEGARA (GOLKAR)

Ya, maaf.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi saya sudah panggil, tapi ngobrol Anda tadi.

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERDIKA SUKMA NEGARA (GOLKAR)

Ya. Mohon maaf, Yang Mulia.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sih. Tapi lain kali jangan begitu. Silakan!

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERDIKA SUKMA NEGARA (GOLKAR)

Sebagai Pihak Terkait dari Partai Golkar. Dengan saya Herdika Sukma Negara, S.H., Yang Mulia.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Sama siapa?

51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERDIKA SUKMA NEGARA (GOLKAR)

Bersama Saudari Fetty.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya. Tadi ngobrol berdua.

53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERDIKA SUKMA NEGARA (GOLKAR)

Ya.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Lain kali enggak boleh begitu di ruang sidang, ya? Baik.

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERDIKA SUKMA NEGARA (GOLKAR)

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan, Yang Mulia!

57. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Kita mulai. Untuk Perkara 217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tidak hadir Partai Berkarya. Jadi

kita tidak melakukan penelusuran untuk meminta menyampaikan permohonan dalam sidang yang pertama ini.

Ini ... silakan nanti Termohon, Pihak Terkait, untuk merespons permohonan 217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini bagaimana, ya, Pak Ali Nurdin, ya? Kemudian, dari Pihak Terkait juga tidak ada. Silakan jadi Termohon saja atau nanti Bawaslu bisa merespons ini, mengenai perkara ini. Tapi jelas bahwa Pemohon tidak hadir pada waktu sidang pendahuluan. Tapi permohonannya ada gitu, ya?

58. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan dengan Perkara 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Amanat Nasional.

Begini, akan saya pandu supaya lebih fokus dan bisa kita selesaikan dengan cepat, menjadi catatan-catatan highlight, sehingga untuk Termohon dan Pihak Terkait dan juga nanti Saudara bisa lebih fokus pada waktu ... kalau ini diteruskan, maka Saudara bisa menghadirkan saksi-saksi yang sesuai dengan apa yang harus dibuktikan, ya?

Saudara mengajukan permohonannya, ini sengketa antar parpol atau internal parpol? Saya ... anu kan ... dulu. Dengan parpol lain, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Terima kasih, Yang Mulia. Kita eksternal antar parpol.

61. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Eksternal antar parpol?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya, ya.

63. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dari PAN. Anda mempersoalkan perolehan suara di partai mana yang dipersoalkan?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Kita mempersoalkan sesungguhnya berkaitan dengan masalah pelanggaran yang berhubungan dengan temuan panwaslu pada saat pencoblosan (...)

65. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Berarti kalau begitu, masalah penyelenggara, ya, Termohon ini, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya.

67. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Kalau begitu di sini Saudara mengajukan permohonan pada tanggal kapan?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Tanggal 23 Mei, Yang Mulia.

69. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

23 Mei, jam?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Kita ajukan pukul 23.10 WIB. Tetapi di dalam permohonan itu tertulis 20.10 WIB. Saya mohon direnvoi, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi permohonannya masuk 23 Mei (...)

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Pukul 23.13 WIB.

73. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lewat 13 menit?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya.

75. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, Saudara menyampaikan perbaikan permohonan?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Perbaikan permohonan dimasukkan kapan?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Tanggal 30 Mei.

79. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

30 Mei?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya, Yang Mulia.

81. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi, permohonan Anda karena yang awal itu memenuhi tenggang waktu, maka Anda bisa memperbaiki dalam waktu 3x24 jam kan?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya, Yang Mulia.

83. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Permohonan perbaikannya masuk tanggal 30 Mei Tahun 2019, pukul 13.56 WIB, betul?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Betul, Yang Mulia.

85. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu ini yang dipakai adalah permohonan perbaikan, ya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya, Yang Mulia.

87. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, sekarang yang harus Anda sampaikan itu yang kita pakai dalam memeriksa, mengadili, dan juga untuk direspons oleh Termohon

dan Pihak Terkait adalah perbaikan permohonan yang diajukan pada hari Kamis, 30 Mei pada pukul 13.56 WIB, ya?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya.

89. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Silakan, Anda mempersoalkan Anggota DPR di ... anu ya, pengisian keanggotaan DPR di kabupaten?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Kabupaten Lembata III, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

91. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Itu di dapilnya berapa dapil di situ yang Anda persoalkan?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Itu Dapil III.

93. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Kalau begitu, sekarang (...)

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

2 kecamatan, Yang Mulia.

95. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Untuk kewenangan, dianggap dibacakan. Untuk kedudukan hukum, dianggap dibacakan. Ya. Ini permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen, ya?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Baik, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, Kedudukan Hukumnya jelas. Tenggat waktunya masih memenuhi syarat. Sekarang kita masuk ke Posita. Silakan untuk Anda menyampaikan Positanya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Yang Mulia, sebelum saya masuk ke Posit ... eh apa namanya ... ke Posita, ada yang direnvoi itu yang tadi, di dalam (...)

99. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Mengenai yang pukul itu, kan?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya, Yang Mulia.

101. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Sama yang persandingan angka, itu dihalaman 5. Menurut versi Pemohon itu seharusnya ... versi Pemohon, Yang Mulia, ya, itu 1.392 bukan 1.900 ... bukan 1.393, Yang Mulia.

103. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dihalaman 5 tabel berapa? Tabel 2?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya, tabel 2 versi Pemohon, Yang Mulia.

105. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang mana yang Anda renvoi?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Yang poin ... apa ... angka 9, Nomor Urut ... PAN, Pak, PAN.

107. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

PAN angka 9?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya.

109. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di sini tertulis 1.393?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya. Seharusnya 2, Yang Mulia.

111. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Seharusnya berapa?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

1.392, Yang Mulia.

113. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

1.392.

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya. Mohon direnvoi juga, mungkin dari Pihak Termohon dengan Pihak Terkait.

115. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Cuma 2 itu aja, Yang Mulia.

117. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus, kemudian perolehan suara di sini tertulis 8, enggak, ya? Enggak masalah, ya?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Enggak. Itu kursi, Yang Mulia.

119. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kursi, ya. Perolehan kursi.

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Kursi terakhir itu.

121. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, makanya itu. Ini enggak direnvoi. Jadi yang direnvoi hanya angka 3 menjadi angka 2?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya, Yang Mulia.

123. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Sama yang pukul (...)

125. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, yang pukul tadi sudah, yang pertama tadi.

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya.

127. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang Positanya bagaimana?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Terkait dengan ... pelaksanaan pencoblosan tanggal 17 itu, pada prinsipnya berjalan lancar. Tetapi, ketika pada saat rekap di tingkat PPK, baru kemudian panwas melakukan temuan bahwa ada pemilih dengan kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan peruntukannya.

129. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Yang seharusnya kan dia pilih di TPS 01 atau 02, tapi dia pilih di TPS tempat lain. Nah, atas dasar temuan tersebut, sesungguhnya dari pihak (...)

131. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang terjadi di Kecamatan Omesuri itu?

132. KUASA HUKUM PEMOHON 120: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya. Ada 2 kecamatan. Kecamatan Omesuri dan juga Kecamatan Buyasuri, Yang Mulia.

133. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Buyasuri?

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya.

135. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Itu yang kecurangan. Nah, kejadian tersebut kemudian temuan panwas itu, lalu kemudian dari Pihak Pemohon melalui saksi mengajukan keberatan juga, Yang Mulia. Kita sudah masukan dalam bukti DA-2, lalu kemudian tidak ditindaklanjuti.

Nah, lalu pun atas kejadian tersebut, pihak PPK tetap menyelenggara ... apa ... rekap. Nah, dari Pihak Pemohon menindaklanjuti laporan tersebut ke Bawaslu kabupaten. Tapi oleh Bawaslu kabupaten, menyatakan tidak ada ruang untuk PSU.

Nah, untuk demi keadilan, maka pada saat itu dilaporkan ke Bawaslu RI. Tetapi oleh Bawaslu RI tidak bisa diberikan nomor dengan alasan bahwa sudah ada laporan di tingkat bawah. Dalam hal ini di panwas kecamatan.

Nah, maka kemudian, demi untuk mencari keadilan sesungguhnya, ya kita mengajukan ke Mahkamah Konstitusi agar supaya di Dapil III Kabupaten Lembata NTT mohon dilakukan untuk PSU. Ada ... hanya beberapa TPS. Kalau tidak salah ada 4, khusus di 2 kecamatan tersebut, Yang Mulia.

Petitum.

137. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor (...)

139. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan.

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

987. Dianggap dibacakan.

141. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (...)

143. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu nomornya gimana itu?

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Itu seharusnya nomor 3, Yang Mulia.

145. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kenapa nomor 3-nya ditaruh di bawah, 4-nya di atas?

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya. Kesalahan pengetikan.

147. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini yang 4 itu sebetulnya angka 3, ya?

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya, Yang Mulia.

149. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Angka 3 sebetulnya 4, ya? Urutannya begitu, kan?

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya, Yang Mulia.

151. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus yang angka 3 dibacakan?

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

4.

153. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang angka 3 dulu.

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya. Yang angka 4 itu, memerintahkan (...)

155. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kepada Komisi Pemilihan Umum (...)

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Untuk melaksanakan putusan ini.

157. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang penting kan inti dari permohonan Anda kan yang Petitem 3, kan?

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya, Yang Mulia.

159. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Coba dibacakan itu.

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Petitem 3 yang di dalamnya tertulis 4, seharusnya Petitem 3, mohon direnvoi Pihak Termohon dan Pihak Terkait.

161. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya sudah.

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Benihading. 2. TPS 01 Desa Leuwohung Kecamatan Buyasuri, dan TPS 2 di Desa Balauring, dan TPS 4 Kecamatan Omesuri, Dapil III Lembata, Yang Mulia.

163. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini, ya. Ini saja, ya?

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya.

165. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti (...)

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Yang (...)

167. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lain kali kalau memerintahkan direnvoi kepada Termohon dan Pihak Terkait yang perintah Hakim jangan Anda.

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya.

169. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Anda enggak boleh perintah ke sana.

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Baik, Yang Mulia.

171. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus? Cukup, ya?

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Cukup, Yang Mulia.

173. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Mestinya itu juga ada tabel yang keliru itu nomornya itu. Di halaman berapa tadi, Mbak? Halaman 3, halaman 4, ya. Halaman 5 itu juga nomornya kebalik-balik itu.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 10 ah ini, mungkin ... anu ... bahasanya, bahasa apa ini dibolak-balik.

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Mohon izin, Yang Mulia, direnvoi saja.

175. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ya, makanya itu. Enggak kita sudah dianggap ini bukan kesalahan yang anu, renvoi, ya?

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya, Yang Mulia.

177. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

PKB 8 itu di atasnya berarti?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Ya, Yang Mulia.

179. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang 9 PAN, ya, betul?

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

PAN, ya.

181. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Letaknya saja yang anu. Ya, baik, terima kasih. Ini kita jalan-jalan lagi ke Nusa Tenggara ini masih. Nusa Tenggara Timur untuk Partai Bulan Bintang.

Ya, baik, kita mulai. Saudara memasukkan Permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi itu kapan?

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan tertanggal hari Kamis 23 Mei, pukul 15.50 WIB.

183. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, tanggal 23 Mei. Jamnya? Pukulnya, pukul berapa?

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

15.50 WIB.

185. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

15.50 WIB. Itu permohonan yang pertama, ya?

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Pertama, Yang Mulia.

187. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian Anda memperbaiki?

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Perbaikan tertanggal (...)

189. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Harinya.

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.00 WIB, Yang Mulia.

191. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ini yang ada lagi perbaikan tanggal 1 Juli gimana ini?

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Tidak ada, Yang Mulia.

193. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Tertanggal 31 Mei.

195. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Diregistrasi, oke. Baik, apa yang dipersoalkan ini DPRD provinsi, atau DPR, atau DPRD kota?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

DPRD Kabupaten Alor IV.

197. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

DPRD kabupaten.

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Dapil Alor IV.

199. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dapil Alor IV. Ya, untuk kewenangan, ini yang tanda tangan Pak Yusril, ya? Sama sekjennya, ya?

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Siap, Yang Mulia.

201. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu kedudukan hukum enggak ada masalah, tenggang waktu juga masih memenuhi. Sekarang ke Pokok Permohonan. Silakan, disampaikan apa persoalannya dalam permohonan Anda?

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Terima kasih, Yang Mulia. Ada pun persoalannya Dapil Alor IV ini terdiri dari 2 kecamatan, Yang Mulia. Jadi yang jadi permasalahan ini ada pengurangan dan penambahan pada daerah kecamatan ... satu buah kecamatan itu Kecamatan Alor Barat Laut, yang mana di sana perubahan dari C-1 bermasalah di DA-1. Jadi dimana C-1 itu terdiri dari 5 desa, suara Pemohon dikurangi, Yang Mulia.

Di antaranya di Desa Alila Selatan yang seharusnya di C-1 itu 73 setelah di-input di DA-1 menjadi 23, Yang Mulia.

203. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Jadi kurang 50.

205. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi ada perbedaan 50 suara, ya?

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Ya, Yang Mulia. Yang kedua di Alor Besar.

207. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu di Alila Selatan? Sekarang Alila Besar?

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Alor Besar.

209. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Alor Besar, ya.

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Ya. Alor Besar itu di C-1, di data kami itu ada 194 suara, namun di DA-1 menjadi 74 suara, Yang Mulia.

211. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Jadi ada kekurangan 120 suara.

213. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, selisih suara 120.

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Kemudian Desa Bampalola, di C-1 ada 52 suara. Ternyata di DA-1 menjadi 1 ... 51 suara.

215. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Jadi suara kami hilang 1 suara, Yang Mulia.

217. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He em.

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Kemudian di Pulau Buaya suara berdasarkan C-1=244 dan di DA-1 menjadi 242, Yang Mulia.

219. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Jadi ada kekurangan 2 suara. Kemudian di Ternate, itu 167 berdasarkan C-1 yang kemudian di DA-1 menjadi 67. Jadi kehilangan 100 suara, Yang Mulia.

221. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Jadi total kehilangan di Kecamatan Alor Barat Laut 273 suara, Yang Mulia.

223. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ini C-1 yang Anda dijadikan dasar itu C-1 nya mana? Di saksi Saudara?

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Ada, ada, Yang Mulia.

225. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Ya.

227. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dijadikan (...)

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Dijadikan bukti.

229. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bukti?

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Bukti.

231. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bukti P berapa itu?

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

P-8.

233. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

P-8. Nanti kita konfrontir dengan C-1 nya Termohon, ya?

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Siap, Yang Mulia.

235. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Apa betul itu dari C-1 berubah di DA-1.

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Ya.

237. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti kita lihat, kita cocokkan bersama.

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Kemudian, Yang Mulia, selain dari pengurangan (...)

239. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi sekali lagi sebetulnya ... sebelumnya, C-1 Anda itu C-1 didasarkan pada saksi Anda, ya?

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Siap, Yang Mulia.

241. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus?

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Kemudian, selain dari pengurangan suara Pemohon, juga terjadi penambahan suara di (...)

243. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk partai lain?

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Di partai lain.

245. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Terdiri dari 2 desa.

247. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Dalam hal ini, Partai Persatuan Pembangunan (...)

249. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Persatuan Pembangunan.

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Pertama di Desa Alila Selatan.

251. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Di C-1 nya 84, Yang Mulia.

253. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Tapi di DA-1 menjadi 144.

255. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi ditambahkan 60?

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Ya, jadi 60.

257. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Yang kedua, di Desa Alor Kecil. Itu di C-1, 238. Kemudian di DA-1 menjadi 336.

259. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Jadi berlebih 98, Yang Mulia.

261. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Jadi, total penambahan suara dari Partai Persatuan Pembangunan, 158, Yang Mulia.

263. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus yang terakhir anunya ... kesimpulannya?

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Kesimpulannya (...)

265. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dalam Petitem gimana, Saudara?

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Dalam Petitem (...)

267. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang Petitem pertama tidak usah dibacakan, ya, itu normatif. Yang kedua juga membatalkan Keputusan Termohon 987 sepanjang untuk NTT Dapil Alor IV kan gitu, to?

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Siap, Yang Mulia.

269. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus, kemudian yang ketiga ini.

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Yang ketiga.

271. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Silakan dibacakan!

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Dalam hal ini, kami Pemohon dalam untuk menduduki bangku ke-4 dengan PPP. Yang pertama Golkar, kedua Nasdem, PDIP, yang keempat itu kita berjumlah total suara kita di Alor Barat Laut itu seribu tujuh ... 1.079, Yang Mulia.

273. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, jadi suara yang benar untuk PBB di Dapil Alor IV adalah 1.079.

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

1.079.

275. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Dan yang kelima, PPP itu 958, Yang Mulia.

277. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

5 ... PPP berapa?

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

958.

279. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini tambahan Anda, ya. Tapi, ya otomatis nanti. Yang penting kan Anda minta ini. PPP-nya berapa?

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

958, Yang Mulia.

281. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

958, oke. Jadi, yang menurut keteta ... anu ... yang diputuskan oleh Termohon, urutannya Golkar, Nasdem, PDI, PPP sebetulnya?

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Awalnya gitu.

283. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Awalnya begitu?

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Ya.

285. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang berarti setelah Anda koreksi melalui permohonan ini, urutannya menjadi Golkar, Nasdem, PDIP, PBB, dan PPP, begitu?

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

PPP, ya.

287. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya, ada lagi yang ingin disampaikan?

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Cukup, Yang Mulia.

289. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya. Silakan, Prof.

290. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tambahan dari saya sedikit saja. Apakah ada keberatan yang diajukan kepada penyelenggara?

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Ada, ada, Yang Mulia. Itu (...)

292. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Menyampaikan keberatan?

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Keberatan dari 16 partai terkait penghitungan di PPK itu, Yang Mulia. Itu bukti P-7.

294. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukti P-7, ya.

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

P-7A, ya. ... B ... AB.

296. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Berapa? P7-AB?

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Ya.

298. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Ini di halaman 4 ini mungkin perlu di ... apa namanya ... dihaluskan sedikit, ya. Ini halaman 4 butir ke-2, ya.

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Siap, Yang Mulia.

300. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bahwa ... bahwa dari keberatan tersebut, Pemohon dan tim melakukan pemeriksaan terhadap beberapa TPS. Mungkin melakukan pengecekan, maksudnya begitu?

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Siap, Yang Mulia.

302. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kalau pemeriksaan itu kesannya kan kayak (...)

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Polisi, ya?

304. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, polisi saja.

305. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, Prof? Ya. Terima kasih, Prof. Cukup ya, PBB?

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Cukup, Yang Mulia.

307. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kita sudah selesaikan. Sekarang kita bergeser ke Partai Gerindra. Ya, ini kita sudah pindah ke DKI, ya, ini, ya? Oh, masih NTT yang ini? Masih NTT, ya. Saya tanyakan terlebih dahulu. Permohonan Anda masuknya kapan?

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Terima kasih, Yang Mulia.
Permohonan dimasukkan pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.

309. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ini catatan kami permohonan diajukan Kamis, 23 Mei pada pukul 23.08 WIB. Yang betul yang mana?

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Oh ya, 23 Mei, Yang Mulia. 23 Mei.

311. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ternyata teliti Mahkamah dibanding Pemohon malah. Ya, yang betul Kamis, 23 Mei pukul 23.08 WIB.

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Ya.

313. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, oke. Jadi, untuk yang Kewenangan, Kedudukan Hukum ... permohonan ini ditandatangani oleh ... oleh ... anu ... ya, Pak Prabowo dan Pak Muzani, ya?

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Benar, Yang Mulia.

315. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu. Silakan, Prof.

316. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sebelum dilanjutkan ini soal permohonan, ya. Ini permohonan ini kan ada perbaikan, betul?

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Betul, Yang Mulia.

318. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Perbaikannya tanggal berapa?

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Perbaikannya tanggal 28 ... 28 Mei, Yang Mulia.

320. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Permohonan awalnya disampaikan tanggal?

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

23.

322. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

23 Mei, ya? Permohonan awal 23 Mei itu termasuk Dapil Kupang IV, betul? Dapilnya Kupang IV?

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Ini untuk DPR RI, Yang Mulia.

324. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, maksud saya pada waktu yang awal, permohonan awal itu ada Dapil Kupang IV?

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Ada, Yang Mulia.

326. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada Dapil Kupang IV, ya?

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Ya.

328. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Memang ... masih dipak ... digunakan enggak ini, yang permohonan awal?

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Tidak lagi, Yang Mulia.

330. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Berarti Dapil Kupang IV enggak ada lagi?

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Tidak ada lagi, Yang Mulia.

332. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ini soalnya saya baca dengan seksama di permohonan awal ini Anda tulisnya Sumatera Utara, begitu. Ada Sumatera Utaranya di sini. Itu untuk permohonan awalnya, ya, yang isinya ada Dapil Kupang IV. Berarti Anda tidak pakai lagi itu?

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Tidak, Yang Mulia.

334. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Berarti yang digunakan sekarang ini adalah permohonan yang?

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Perbaikan.

336. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Perbaikan. Yang tidak ada Dapil Kupang IV-nya?

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Yang tidak ada, Yang Mulia.

338. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Berarti Dapil Kupang IV sudah tidak ada lagi, ya?

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Tidak ada lagi. Yang ada hanya DPR RI saja.

340. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

DPR RI saja. Terima kasih.

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Itupun kami juga buat coba ... buat dalam bentuk ringkasan, kalau Yang Mulia berkenan, kami juga bisa ajukan kepada Yang Mulia sekarang ini juga ringkasan dari permohonan ini. Kalau Yang Mulia berkenan.

342. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ini, ini anu ... Anda memang membingungkan ini pada waktu mengajukan permohonan itu. Ini saya kembali ... saya mau ... anu ... melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Enny.

Permohonan Anda dimasukkan pada tanggal 23 Mei, ya. Di situ permohonan berisi untuk Dapil NTT II, Dapil Kupang II, Dapil Kupang IV, betul yang pertama?

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama itu, gugatan itu dimasukkan gelondongan bersamaan semua.

344. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Sedangkan dalam perbaikan (...)

346. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Perbaikan permohonan (...)

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Itu dilakukan sendiri karena yang dilanjutkan perkaranya itu hanya untuk DPR RI.

348. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, tinggal Dapil NTT II?

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Ya, Yang Mulia.

350. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berarti yang Dapil Kupang II dan Dapil Kupang IV?

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Tidak ada (...)

352. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di cabut, ya?

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Di cabut, Yang Mulia.

354. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ini jelas ini Termohon, ya. Jadi, tidak ada permohonan ... jadi hanya gugatan yang tepat adalah permohonan. Permohonan yang betul adalah permohonan perbaikan untuk Dapil Kupang II dan Dapil Kupang IV di cabut. Hanya permohonan untuk keanggotaan DPR RI yang dipersoalkan adalah persoalan Dapil NTT II, gitu ya?

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Ya, Yang Mulia.

356. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sudah klir, kalau begitu. Silakan, ya ... anu ... disampaikan.

357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Terima kasih, Yang Mulia.

358. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Mohon izin, Yang Mulia.

359. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

360. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Dari Termohon.

361. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Silakan! Sebentar, Pemohon.

362. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Di ... berkaitan dengan perbaikan, Yang Mulia.

363. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

364. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Tadi kita mendengar dari Pemohon itu, pertama mengajukan tanggal 23 Mei.

365. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

366. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Kemudian di kami ini yang mengajukan yang kedua itu 31 Mei.

367. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

368. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Kemudian yang ketiga itu 11 Juni, Yang Mulia.

369. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

11?

370. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Juni.

371. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, kalau itu yang ... ya, kalau yang ... berarti 11 Juni kan sudah ... Silakan nanti Termohon menanggapi.

372. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Baik. Ya, itu, ya.

373. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

374. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Sekali lagi untuk yang kedua itu bukan 28 Mei, tapi 31 Mei (...)

375. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

376. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Mohon, kami yang (...)

377. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi ini ... sekarang Pemohon kembali, yang mau digunakan itu berarti yang mau disampaikan adalah permohonan perbaikan yang dilakukan 31 Mei, ya?

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Ya, yang ... prinsipnya yang kami pakai adalah yang perbaikan.

379. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Perbaikan 31 Mei, toh?

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Ya, Yang Mulia.

381. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, gitu, jelas, ya. Nanti kalau ada ... anu ... ya, ditanggapi kalau yang itu. Jadi memang ada perbaikan, yang dilakukan yang diterima Mahkamah itu 11 Juni.

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Betul.

383. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan? Tapi juga untuk Dapil NTT II. Tapi ini yang dipakai tadi sudah saya tegaskan, minta koler ... anu ... konfirmasi, yang akan dibacakan adalah perbaikan permohonan yang masuk pada tanggal 31 Mei, ya?

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Mohon ini, Yang Mulia. Yang ini di ... kami pakai yang tanggal 31 Mei dengan tanggal 11 Juni itu sama saja, Yang Mulia. Isinya sama (...)

385. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa kok, enggak diperbaiki?

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Karena (...)

387. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau sama tetap yang bisa dipakai adalah yang 31 Mei.

388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Ada ... ada perbaikan ... pergeseran ini saja yang poin 1 dimasukkan ke ... jadi poin 3. Nah itu saja, Yang Mulia.

389. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah, nanti direspons saja, ya, yang untuk 11 Juni nanti gimana. Ya, silakan Anda baca ... sampaikan pokok-pokoknya.

390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

1. Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap terbaca (...)

391. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, enggak usah dibacakan itu tadi.

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Kedudukan Hukum (...)

393. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah, enggak ada masalah. Tenggat waktu juga sudah enggak ada masalah.

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Pokok Permohonan.

395. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

1. Bahwa menurut perhitungan Termohon, total suara Pemohon untuk pengisian anggota DPR RI di Daerah Dapil pemilihan NTT II adalah hanya sejumlah 75.782 suara. Hal mana sangat tidak signifikan dengan besarnya dukungan dan pengakuan masyarakat yang memilih Ir. Fary Djemy Francis, MMA., sebagai salah satu caleg dari Partai Gerindra dengan Nomor Urut 1 pada saat pemilihan umum pada tanggal 17 April 2019 yang lalu.
2. Bahwa surat Pemohon ... suara Pemohon yang hanya sejumlah 78.000 ... 75.782 suara itu adalah akibat kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan peserta pemilu lain yang pada saat penghitungan suara dengan sengaja menghilangkan suara dari Ir. Fary Djemy Francis, MMA. (Partai Gerindra) di Kabupaten Sumba Barat Daya khususnya di Kecamatan Wewewa Timur, dan di Kabupaten Timur Tengah Utara yang merupakan daerah basis suara dari Pemohon.
3. Bahwa ada pun bentuk-bentuk kecurangan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Penambahan dan pengurangan suara dari semua peserta pemilu di seluruh kabupaten/kota dalam Dapil NTT II minus Kecamatan Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya antara jumlah suara pada C1-DPR.RI di 1 pihak disandingkan dengan DA1-DPR.RI, DB1-DPR.RI, dan DC1-DPR.RI, DD1-DPR.RI (...)

397. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar, Pemohon?

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Ya? Ya.

399. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar. Sekali lagi, ini penegasan. Yang Anda baca itu permohonan yang mana itu?

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Itu yang tanggal 11 ini ... review dari tanggal 11, itu, Yang Mulia.
Kami ringkaskan lagi dari yang tanggal 11 itu.

401. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sekali lagi, ya. Mohon nanti ini diperhatikan bahwa kita sudah punya aturan mengenai tenggat waktu. Nanti tolong, Para Termohon untuk menanggapi soal ini.

402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Baik, Yang Mulia.

Adalah 10.958 suara. Hal mana sudah tentu tidak boleh terjadi karena seharusnya total jumlah suara yang tertuang dalam C1-DPR.RI harus sama persis dengan total jumlah suara yang tertuang dalam DA1-DPR.RI, DB1-DPR.RI, dan DC1-DPR.RI, DD1-DPR.RI (vide tabel 1 sampai dengan tabel 12).

Bahwa ... bahwa total suara yang dicurangi oleh Termohon secara sistematis, terstruktur, dan masif dengan modus penambahan dan pengurangan suara untuk DPR RI di seluruh kabupaten/kota(...)

403. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada enggak yang lebih sistematis tanpa dibacakan keseluruhan. Kalau mau dibaca itu, berapa halaman itu?

404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Sedikit saja, Yang Mulia.

405. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berapa halaman? Sedikit itu berapa halaman?

406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Paling, ini hanya 4 halaman saja, Yang Mulia.

407. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

4 halaman? Oke. Tapi, sebetulnya bisa sistematis. Yang Anda persoalkan itu di dapil mana? Di sini ada penambahan, di sini ada kekurangan ... anu ... pengurangan, gitu, yang sistematis.

408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Dari bentuk-bentuk kecurangan itu, Yang Mulia. Yang pertama itu dalam bentuk penambahan dan pengurangan suara untuk partai-partai. Yang kami ... setelah kami sudah hitung kembali semua.

409. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu terjadi di mana?

410. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Di seluruh ini. Yang poin a di seluruh dapil ini, NTT II.

411. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, di seluruh NTT II?

412. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Ya.

413. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dapil NTT II, ya.

414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Sehingga total, ini suara yang ditambahkan dengan penambahan dan pengurangan itu totalnya 22.508 suara dengan rincian, penambahan 16.733 suara, pengurangan 5.775 suara (vide tabel 1 sampai dengan tabel 12). Hal mana sangat signifikan untuk menentukan komposisi perolehan suara dari partai peserta pemilu dan pula sangat signifikan dalam menentukan pengisian Keanggotaan DPR RI, Dapil NTT II yang hanya terpaut 2.669 suara saja.

Bahwa peserta pemilu yang paling diuntungkan oleh kecurangan sistematis, terstruktur, dan masif dengan modus penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon, antara lain.

- Nasdem 4.268 suara.
- Demokrat 3.212 suara.
- PDIP 3.180 suara.
- Golkar 2.084 suara.

B. Tingkat partisipasi pemilih masyarakat lebih dari 90%, bahkan lebih dari 100% yang terjadi pada 150 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya yang tersebar di Kecamatan Kota Tambolaka dan rinciannya itu ada di dalam permohonan. Dan juga yang tersebar di 35 TPS di Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara. Dan dalam perhitungan suara daftar hadir pemilih atau form C-7 pada 150 TPS tersebut di atas tidak pernah ditunjukkan oleh Termohon selama dan dalam proses rekapitulasi suara, meskipun telah didesak untuk dibuka pada saat rekapitulasi tingkat PPK guna dicocokkan dengan data partisipasi pemilih pada TPS-TPS tersebut.

C. Kotak suara pada 159 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya disimpan lebih dari 2 hari setelah hari pencoblosan tanpa alasan yang sah.

D. Pada tanggal 28 April 2019 telah terjadi pembukaan kotak suara untuk 2 desa, yakni Desa Noha dan Witaro, di Kecamatan Kodi Utara oleh PPK ... di Desa Noha dengan Desa Witaro Kecamatan ... Kabupaten Sumba Barat Daya oleh PPK dan panwascam pada Jam 24.00 WITA, tanpa disaksikan oleh saksi peserta pemilu.

E. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rote Ndao telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 158 dan seterusnya agar Termohon melakukan pemungutan suara ulang pada 15 TPS yang hingga kini tidak dilaksanakan oleh Termohon tanpa alasan yang sah.

F. Lebih dari 90% C1-DPR.RI tidak ditandatangani oleh saksi dari Partai Gerindra.

G. Terdapat C1-DPR.RI yang sama sekali tidak ditandatangani oleh saksi-saksi atau hanya 1, 2 saksi saja dari peserta pemilu. Seperti yang terjadi di TPS 01 Desa Mareda Kalada, Sumba Barat Daya.

H. Terdapat C1-DPR.RI yang partai suaranya hanya satu atau dua partai saja. Seperti yang terjadi pada TPS 3 Desa Mahendra oleh Kecamatan Wewewa Timur.

I. Pada saat pemungutan suara, surat suara yang dibagi hanya untuk DPR saja, seperti terjadi di TPS 2 Desa Weliman.

J. Perubahan penulisan angka pada C-1 DPR RI dilakukan secara melanggar hukum tanpa dapat dilacak, mana yang salah dan mana yang benar. Juga tanpa dibubuhi paraf yang sah, seperti terjadi pada TPS 01 Desa Mareda Kalada.

K. Tanda tangan C1-DPR.RI baik dari KPPS maupun dari saksi pemilu ... peserta pemilu sangat diragukan dan diduga kuat hasil manipulasi, seperti yang terjadi pada TPS 01 Desa Nurulele.

L. DA-1 plano pada tingkat Kecamatan Wewewa Timur tidak terisi dan tidak ditandatangani semestinya.

M. Terdapat dua DA1-DPR.RI untuk Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

4. Bahwa berdasarkan pengakuan masyarakat pendukung Pemohon yang tersebar di TPS-TPS di 16 Desa di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, setidaknya-tidaknya terdapat pengurangan suara Ir. Fary Djemy Francis, MMA. Sejumlah 2.033 suara yang dibuktikan oleh surat pernyataan dukungan warga Kabupaten Sumba Barat Daya. Vide Bukti P-2 DPR RI, NTT II, 24.

Bahwa dari data dukungan yang terekam disandingkan dengan DA1-DPR.RI pada 16 Desa tersebut, terungkap bahwa pada 16 Desa tersebut, yang memilih Ir. Fary Djemy Francis adalah berjumlah total 2.189, akan tetapi yang tertuang dalam DA1-DPR.RI hanya berjumlah (...)

415. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon, itu juga berbeda dengan ini yang di 31, Pemohon?

416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Sehingga terdapat pengurangan 2.033 suara (...)

417. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon? Berhenti dulu.

418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Ya, Yang Mulia?

419. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini juga beda dengan apa yang ... anu ... itu diringkas dari mana itu?

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Ya. Ini ... ini kami ... apa namanya ... berdasarkan data yang kami ajukan di dalam bukti, Yang Mulia. Ini yang kami bacakan ini berdasarkan bukti yang kami ajukan.

421. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, begini, ya. Sebetulnya begini, Saudara itu kan tahu persis, Permohonan PHPU pileg itu kan 3 hari sebelum ... anu ... 3 hari sesudah ditetapkan. Kalau tiga hari itu, berarti kan ada batas waktu sampai tanggal 24 pukul 01.46 WIB. Karena Putusan 987 itu ditetapkan pada pukul 01.46 WIB. Tanggal 21, ya? KPU, ya? Kemudian, 3 hari ... itu bukan 3 hari, 3X24 jam, berarti pada tanggal 24 pukul 01.46 WIB, Anda permohonan yang pertama masuk. Tapi kemudian, Anda membuat perbaikan yang pertama masuknya tanggal 31 Mei 2019, itu masuk. Karena perbaikan juga setelah itu 3X24 jam. Tapi kalau Anda membuat perbaikan yang ketiga, dimasukkan tanggal 1 Juli 2019, perbaikan itu sudah lewat waktu.

Makanya Pihak Termohon kan tadi menyampaikan. Ini permohonan yang Anda bacakan itu, sebetulnya sudah lewat waktu. Gitu loh, ya? Jadi, kita itu sebetulnya mau memeriksa, mengadili berdasarkan permohonan yang masih dalam tenggat waktu. Apalagi, kemudian Anda menambahkan yang berbeda dengan malah yang dibacakan tanggal 1 Juli juga berbeda lagi.

Ini, saya ... satu, Termohon nanti merespons yang apa? Bingung. Anda bisa langsung dieksepsi bahwa ini permohonan tidak jelas. Pihak Terkait juga nanti bingung merespons apa? Itu juga tidak jelas, gitu loh. Makanya kita tadi sejak awal menegaskan, begitu. Karena ada hukum acara yang mengatakan begitu, undang-undang juga mengatakan begitu. Tapi Anda, ya sudah kalau ini dibacakan. Tapi ternyata setelah dibacakan, tapi nanti ... nanti direspons oleh Pihak Termohon dan Pihak Terkait. Pasti Pihak Termohon dan Pihak Terkait merespons bahwa apa yang Anda bacakan itu sudah lewat waktu, gitu loh.

Makanya ini harus terbuka untuk umum dan diketahui bahwa permohonan Anda itu yang dibaca tanggal 1 Juli adalah itu adalah permohonan yang sudah lewat waktu perbaikan, yang sudah lewat waktu. Apalagi ini tadi, yang dibacakan itu berbeda sekali dengan permohonan perbaikan yang masuk tanggal 1 Juli 2019.

Tapi Anda mengatakan, ini sebetulnya bukti. Lho, kalau bukti ya enggak usah di ... anu ... kan ini bukti P ini di sini saja enggak usah dibacakan begitu, itu lho. Kalau yang lain kan bisa lebih sistematis, jelas tadi.

422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Ya.

423. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Permohonan saya begini, ini di sini, penambahan ini, pengurangan buktinya ini. Itu karena sudah fokus.

424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Ya.

425. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, kalau Anda kan berarti karena tidak tahu, tidak tahu fokus dan ini, berarti malah kemudian bisa dibacakan seluruhnya, dan itu yang dibacakan tidak ... anu ... gimana Saudara ini? Mau diteruskan ... anunya?

Jadi intinya, sebetulnya Saudara mempersoalkan bahwa di NTT II itu ada persoalan pada waktu ... anu ... tapi Anda dalil yang utama adalah TSM itu, toh? Di situ?

426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Ya, Yang Mulia. Pengurangan itu.

427. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu kan? Ya. TSM-nya terjadi. Kemudian pengurangan dan penambahan yang menguntungkan partai lain, merugikan Caleg Partai Golkar atas nama tadi siapa?

428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Gerindra ... Gerindra, Yang Mulia.

429. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Eh, sori, Partai Gerindra Ir. Siapa tadi?

430. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Ir. Fary Djemy Francis, MMA.

431. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Fary Djemy. Ya, itu. Intinya kan itu. Sehingga kemudian di akhir mestinya, Anda sampai pada kesimpulan, dirugikan berapa caleg itu suaranya.

432. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Baik.

433. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Gitu.

434. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Baik.

435. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan? Anu ... kok gampang sebetulnya PHPU itu ... anunya ... ya? Silakan, kalau begitu ini sekarang sudah saya simpulkan dipermohonan Anda, itu disertai bukti-bukti yang Anda sebutkan tadi, ya. Sekarang pada Petitumnya Anda mengatakan gimana? Perolehan suara yang benar?

436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Ini perolehan suara yang benar itu untuk poin 7 itu mengatakan perolehan suara yang benar Partai Gerindra untuk pengisian DPR RI itu adalah 79.717.

437. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar, Pemohon. Ini kembali ke permohonan yang mana itu? Yang nomor 7 itu beda kalau di permohonan yang ... Anda mau pakai

yang mana ini? Permohonan 31 Mei atau permohonan yang tanggal 1 ...
11 Juni?

438. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini beda. Permohonan 1 Juli, itu di sini (...)

439. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Kami pakai yang ini saja, Yang Mulia (...)

440. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

perolehan suara yang benar 788.500[sic!].

441. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Kami pakai yang 78.852.

442. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, iya. Tadikan Anda bacakan bukan 78.852, kan?

443. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Ya. Kami kembalikan ke perbaikan tanggal 11 itu, Yang Mulia.
Yang 78.852.

444. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar ini.

445. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Prof!

446. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini yang 11 Juni, petitumnya apa saja? Coba dilihat!

447. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Sama, Yang Mulia. Hanya perbedaannya (...)

448. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Coba dibacakan Petitemnya langsung!

449. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan komposisi jumlah perolehan suara peserta pemilu legislatif 2019 untuk pengisian DPR RI Dapil NTT II, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPP/06/KPU/V/2019 adalah tidak benar, tidak sah, dan cacat hukum.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 97/PL.01.8-KPP/ (...)

450. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dan seterusnya. Terus yang berikutnya?

451. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Dan seterusnya.

4. Memerintahkan Termohon membawa C-1 Plano dan Form C-7 untuk dilakukan penghitungan ulang depan persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara ini. Atau,
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 209 TPS yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat daya, Timur Tengah Utara, dan Rote Ndao. Atau,
6. Memerintahkan Termohon untuk menanggukuhkan keputusan tentang komposisi perolehan suara dari partai peserta pemilu di dapil NTT II sampai selesainya penghitungan saura pemungutan suara ulang (...)

452. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, itu berarti yang Anda bacakan itu saya sandingkan, sebentar Pemohon! Itu adalah Petitem yang tanggal 11 Juni? Betul?

453. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Ya, Yang Mulia.

7. Menyatakan perolehan suara yang benar dari Partai Gerindra untuk pengisian DPR RI Dapil NTT II adalah 78.852 suara.
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya. Ex aequo et bono.

454. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Jadi sudah disampaikan. Terserah nanti Termohon dan Pihak Terkait merespons apa itu, ya. Jadi Saudara harus tahu juga, ini karena sidang terbuka untuk umum, ya. Jadi Permohonan itu PHPU ada waktu 3x24 jam. Terus kemudian masih diberi kesempatan oleh undang-undang memperbaiki 3x34 jam. Perbaikan Saudara, ada yang melewati tenggang waktu yang sudah ditentukan itu. Itu yang harus diketahui, ya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan?

455. ANGGOTA KPU: HASYIM ASY'ARI

Majelis, Termohon, Prinsipal.

456. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, sebentar, sebentar. Silakan kalau masih ada yang di ... anukan.

457. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Sementara cukup, Yang Mulia.

458. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya? Ya. Tadi siapa yang mau ngomong? Silakan! Oh, Pak Hasyim. Silakan, Pak Hasyim!

459. ANGGOTA KPU: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Yang Mulia. Sekiranya memang ada batas waktu untuk perbaikan sampai dengan 31 Mei, mestinya selewat dari itu menjadi tidak relevan untuk dibacakan.

Oleh karena itu, kami mohon Majelis untuk memerintahkan Pemohon membacakan yang tanggal 31 Mei. Supaya kami juga jelas, apa-apa dalilnya dan kemudian petitem yang disampaikan pada batas waktu perbaikan sampai dengan 31 Mei 2019. Demikian, Yang Mulia.

460. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu nanti dijawab Termohon, silakan saja. Ya, dijawab. Tapi memang Mahkamah tidak bisa menolak apapun yang masuk kepada Mahkamah, enggak bisa menolak, prinsip kita harus menerima, kan. Tapi itu nanti bisa mau ditanggapi, eksepsi bagaimana, terserah. Dan nanti semuanya yang menilai kan kita. Makanya saya tekankan, ya, itu sebetulnya sebagai satu dasar hukum untuk menilai itu, ya, itu tadi gitu, ya. Baik, terima kasih Partai Gerindra.

Sekarang Perkara 39 dari Partai Hanura.

461. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Interupsi, Yang Mulia. Mohon izin.

462. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada ... tadi katanya sudah selesai?

463. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Mohon izin, Yang Mulia, kebetulan kami masih ada beberapa bukti tambahan yang ini, mohon (...)

464. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah dileges?

465. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Sudah dileges semua, Yang Mulia.

466. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang diserahkan sekarang. Jadi (...)

467. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Baik, Yang Mulia.

468. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bukti tambahan dari Pemohon masih bisa diserahkan sebelum sidang ini ditutup, jadi nanti akan disahkan. Silakan, Petugas untuk mengambil! Ya, diverifikasi dulu.

Baik. Yang Hanura sekarang.

469. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Terima kasih, Yang Mulia.

470. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Permohonannya ... baik. Silakan. Sekarang kita cek dulu, Anda hanya ada 1 permohonan, ya?

471. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

1 permohonan saja, Yang Mulia.

472. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada perbaikan, ya?

473. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Tidak ada, Yang Mulia.

474. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

475. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Itu yang terakhir, Yang Mulia.

476. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang terakhir, ya?

477. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

He em.

478. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Permohonan ini masuk tanggal berapa ini?

479. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Sebentar, tanggal 30 Mei yang terakhir, Yang Mulia.

480. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

30 Mei.

481. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

He em.

482. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, tenggang waktu yang pertama Saudara (...)

483. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Yang pertama 23 Mei, Yang Mulia.

484. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

23 Mei, ya.

485. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Pukul 00.15 WIB, ya.

486. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, 23 Mei. Tapi Saudara salah menuliskan ... anu ... Putusan KPU 987 itu ditetapkan 01.46 WIB, ya, Pak Hasyim, ya? Bukan 01.45 WIB (...)

487. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Oh, ya, 01.46 WIB, Yang Mulia.

488. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi memang enggak bagus itu kalau pukul 01.45 WIB, tapi ini pukul 01.46 WIB.

489. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Ya, mohon direnvoi, Yang Mulia.

490. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, pukul 01.46 WIB. Ya, jadi permohonan yang pertama masuk masih memenuhi. Terus, kemudian Kedudukan Hukum ditandatangani Pak Usman Sapta dan Pak (...)

491. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Izin, Yang Mulia. Dari Termohon, Yang Mulia.

492. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

493. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Tadi kita dengan dari Pemohon ini (...)

494. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

495. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Itu permohonan per tanggal 23.

496. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar kita cek dulu.

Ya, ada 2, tapi perbaikannya hanya 1 yang ini.

497. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Per tanggal ... yang kami ada itu, pertama, tadi kita dengar ada pengajuan permohonan per tanggal 23 Mei.

498. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sebentar. Kita cek memang ada ... anu ... Saudara mengajukan permohonan itu tanggal berapa yang pertama?

499. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Oh, mohon maaf, Yang Mulia, saya tidak membawa ... lupa bawa tanda terimanya, Yang Mulia. Pas hari terakhir itu, Yang Mulia.

500. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, hari terakhir ini ada (...)

501. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

24 berarti.

502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Oh, 24 berarti, Pak.

503. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Ya, 24.

505. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ada ini yang pertama.

506. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

He em.

507. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini pada pukul 00.15 WIB.

508. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Pukul 00.15 WIB, Yang Mulia.

509. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Padahal yang ... harus terakhir supaya memenuhi syarat kan 146.

510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

146.

511. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ini terus diperbaiki dengan yang ini, kan?

512. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Ya, Yang Mulia.

513. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang yang dipakai yang ini kan berarti?

514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Ya, yang terakhir, Yang Mulia.

515. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena perbaikan ini masih memenuhi tenggang waktu perbaikan.

516. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Masih, Yang Mulia. Ya, ya.

517. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

518. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Ada perbaikan. Ya.

519. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Termohon, ya? Ya, baik, klir, ya.

Jadi, untuk kewenangan, tenggang waktu tidak usah dibacakan sudah memenuhi, tenggang waktunya juga masih. Sekarang Saudara mempersoalkan DPRD?

520. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Rote Ndao I, Yang Mulia.

521. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di Rote Ndao I. Ya, silakan disampaikan Posita Saudara.

522. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk persandingan perolehan suara calon anggota DPR menurut Termohon dan Termohon, nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Yulius Nifran Molisan, S.H., menurut Termohon 444 dan Pemohon 448 ada selisih 4 suara, Yang Mulia.

Terus terjadi kesalahan perhitungan pada TPS 02 bahwa suara suara sah terhadap Pemohon oleh petugas KPPS dimana terjadi pencoblosan gambar partai dan nomor urut calon, dimana seharusnya itu diberikan kepada Pemohon, Yang Mulia.

Terus, yang kedua. KPPS menetapkan suara sah untuk partai yang seharusnya diberikan pada Pemohon, sehingga Pemohon kehilangan 2 suara. Poinnya itu saja, Yang Mulia. Yang intinya terjadi 448 suara.

523. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi sebetulnya ada ... anu ... ya.

524. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Kesalahan penetapan, Yang Mulia.

525. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bertambah 4 suara, ya, selisihnya itu.

526. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Selisih ... berkurang 4 suara.

527. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berkurang 4 suara, ya, baik.

528. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Petitum.

Yang Pertama. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Membatalkan keputusan KPU, kami tidak bacakan. Terus, menetapkan hasil perolehan suara sah yang benar menurut Pemohon. Untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Rote Ndao, perolehan suaranya yaitu (...)

529. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang benar 448?

530. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

448.

531. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

532. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Atau setidaknya-tidaknya memintakan Pemohon atau KPUD kabupaten/kota melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 02 Rote Ndao, di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Yang kelima, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum melaksanakan putusan ini, Yang Mulia.

533. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

534. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Terima kasih, Yang Mulia.

535. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih. Saudara mengajukan bukti berapa itu untuk mendukung dalil ini?

536. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Bukti yang kita ajukan ada 10 bukti, Yang Mulia.

537. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

538. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Ada 10 bukti, Yang Mulia.

539. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Khusus yang ini yang berhubungan dengan perolehan angka-angka ini di ... buktinya di P berapa?

540. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Di P-2, Yang Mulia.

541. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

P-2, ya.

542. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Yang paling ... di P-2 (...)

543. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi Saudara mengajukan seluruhnya bukti P-1 sampai dengan P-10?

544. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Ya, Yang Mulia.

545. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ada lagi yang akan disampaikan?

546. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Kita sebenarnya masih ada bukti yang mau kita masukkan, cuma kita belum persiapan, Yang Mulia, daftar buktinya.

547. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, jangan ... anu ... nanti kelewat. Kalau bisa sekarang, segera. Sudah dileges apa belum?

548. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Belum... eh sudah dileges, Yang Mulia, cuma ada daftar buktinya belum kita buat, Yang Mulia.

549. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang saja diproses segera. Nanti kita anu ... ya.
Baik, sudah cukup?

550. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Cukup, Yang Mulia.

551. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.
Yang terakhir, sekarang Perkara Nomor 245/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Garuda.

552. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmaanirrahiim (...)

553. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, untuk permohonannya ... permohonan pertama Saudara mengajukan?

554. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Kami akan jelaskan semuanya, Yang Mulia.

555. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

556. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

557. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

558. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Yang terhormat, teman-teman rekan di Pihak Termohon maupun rekan-rekan penyelenggara pemilu, Bawaslu, dan rekan-rekan Pihak Terkait.

Sebelumnya, Yang Mulia, kami jelaskan. Bahwa permohonan awal kami dimasukkan tertanggal 24 Mei, Yang Mulia, itu dengan atas nama Kuasa Hukum awal yaitu Husein Abudin. Kemudian, Kuasa Hukum sebelumnya diganti dengan kami atas nama Saleh Kabakoran ... dalam Kantor Saleh Kabakoran And Partner, saya sendiri, Yang Mulia. Kemudian, kami melakukan perbaikan tertanggal 31 Mei, Yang Mulia. Kemudian, kami juga memasukkan perbaikan tanggal 5 Juli, Yang Mulia, dan kami ingin menegaskan bahwa perbaikan kami tanggal 5 Juli itu sama dengan tanggal 31 Mei. Jadi yang kami bacakan sekarang adalah yang tanggal 31 Mei, Yang Mulia.

559. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

560. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Sebelum Yang Mulia nanti koreksi ke kami.

561. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, yang 5 Juli dianggap tidak ada, ya?

562. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Tidak ada, Yang Mulia.

563. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

564. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Oke. Jadi kami yang bacakan yang sekarang ini tanggal (...)

565. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini ... anu ... ya, Kuasanya Abdul Jabar enggak tanda tangan, ya?

566. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia, betul.

567. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap tidak ada, ya?

568. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia, betul.

569. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Soalnya, nanti kalau masih dicantumkan nanti dia minta bagian kan repot malah.

570. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Oke. Kami lanjutkan, Yang Mulia. Izinkan kami lanjutkan.

571. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

572. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Izinkan kami untuk membacakan Posita kami ini dalam bentuk-bentuk yang sederhana saja, Yang Mulia.

573. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

574. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Pokok-pokoknya saja.
Sebelumnya, Yang Mulia, di ... yang kami gugat ini di Flores, Dapil Flores Timur I, Yang Mulia, di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

575. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

576. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Sebelumnya itu, dalam data Situng, Yang Mulia, yang kami akses melalui website Pihak Termohon KPUD ... Pihak Termohon KPU, Yang Mulia, itu dijelaskan bahwa ditunjukkan data yang masuk dari keseluruhan tep ... jumlah TPS di Dapil I Flores Timur itu 689.

577. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi Anda itu menggunakan basis untuk ... anu ... itu data di Situng?

578. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Data Situng, Yang Mulia.

579. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

580. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Kami ingin membandingkan data Situng sama data ... sama data DB-1 yang ditetapkan Pihak Termohon KPUD. Jadi ada perselisihan suara, ya, sehingga memengaruhi pengisian keanggotaan DPRD, khususnya untuk kursi jatah kursi ke-4, Yang Mulia, di Dapil Flores Timur I.

Jadi, dalam data Situng itu, Yang Mulia, yang kami akses tanggal 20 Mei 2019 sebelum (...)

581. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang enggak punya data C-1 dari saksi Anda?

582. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Kami punya, ada, Yang Mulia.

583. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, kenapa yang ... enggak dipakai yang dipakai kok enggak yang C-1 saja?

584. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Enggak, maksud kami, ini lagi kami mau ... mau membandingkan antara data C-1 yang kami miliki dengan data Situng yang kami akses, Yang Mulia. Jadi, ada data Situng yang kami akses ini suara Partai Golkar atau Pihak Terkait, itu jumlah suaranya 1.981. Namun, yang ditetapkan oleh Termohon KPUD Kabupaten Flores Timur ... Flores Timur, itu menjadi 2018, Yang Mulia. Hal ini dapat dilihat di keterangan Posita kami nomor ... di nomor 6, Yang Mulia.

585. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

586. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Nah itu dijelaskan di situ. Data DB-1 Termohon telah menetapkan suara Partai Golkar itu 2018. Sementara data Situng yang kami akses melalui laman website Pihak Termohon KPU itu 1.981, dan itu angka ini kita akses, itu sudah 100% seluruh jumlah TPS yang sudah masuk, Yang Mulia.

Jadi, ada semacam perbandingan, ada semacam ... apa namanya ... penambahan suara pada saat dilakukan penetapan hasil rekapitulasi suara oleh Termohon KPUD Flores Timur, Yang Mulia.

Kemudian Yang Mulia, selain data Situng ... data Situng dan perbandingan data C-1 milik kami, ada juga laporan Yang Mulia, aduan dari masyarakat khususnya di Kelurahan Sarotari. Itu masyarakat melaporkan kepada DPC Partai Garuda di wilayah setempat bahwa ada dugaan kecurangan yang dilakukan pada saat proses perhitungan suara pada tingkat TPS, yaitu di TPS 1 sama TPS 4, Yang Mulia. Di (...)

587. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang lapor masyarakat?

588. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, yang lapor masyarakat.

589. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lapor kepada siapa?

590. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Lapor kepada kami, Yang Mulia, saksi termasuk (...)

591. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi itu dilaporkan ke Bawaslu, enggak?

592. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya. Makanya ini kami mau jelaskan, Yang Mulia.

Jadi ketika kami mendengar laporan dari masyarakat tersebut, kami kemudian melakukan laporan terhadap Bawaslu Kabupaten Flores Timur, Yang Mulia. Itu bisa dapat dilihat, Yang Mulia, dalam penjelasan posita kami, itu di nomor 11, Yang Mulia. Itu ada surat dari kami Nomor 58 DPC Garuda yang kami surati ke Bawaslu Kabupaten Provinsi. Kemudian juga (...)

593. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar, sebentar, sebentar Pemohon. Posita nomor 11 ... nomor 11 halaman berapa?

594. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Posita 11 halaman 7, Yang Mulia, mohon maaf.

595. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman?

596. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

7, nomor 7.

597. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dari permohonan tanggal 31 Mei?

598. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Betul, Yang Mulia.

599. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Perbaikan?

600. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, betul, Yang Mulia.

601. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kok enggak ketemu saya, ya.

602. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Oh (...)

603. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Eenggak ada halamannya.

604. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Mohon maaf, Yang Mulia (...)

605. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Eenggak, ini Anda jangan-jangan baca yang tadi katanya Anda ini sudah ditarik tadi? Yang permohonan perbaikan yang melampaui waktu itu?

606. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Izin, Yang Mulia. Saya ingin (...)

607. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tolong diklarifikasi dulu.

608. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Oke, oke. Jadi, mohon maaf, dalam lembaran kertas yang kami ini ... kami untuk nomor halamannya mohon maaf yang kami kasih mungkin tidak di apa namanya ... ditaruh nomornya per lembar, maksudnya halamannya. Sementara untuk perbaikan tanggal 1 Juli ... 5 Juli itu, sebenarnya sama, Yang Mulia, gitu.

609. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang Anda baca ini sebetulnya (...)

610. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Yang tanggal 31 (...)

611. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanggal 31?

612. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Tanggal 31.

613. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang tidak ada halaman ini?

614. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, betul, Yang Mulia.

615. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebelum, sebelum Anda lanjutkan, ya, ini perlu saya ... anu ... cek lagi.

616. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Oke.

617. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau yang Anda maksudkan di sini, kan bicaranya adalah dapilnya Flores Timur, ya?

618. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Flores Timur I, Yang Mulia, betul.

619. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, Flores Timur I dapilnya Anda. Tetapi kemudian ada lagi saya lihat Dapil Alor IV. Alor IV itu Anda ajukan juga?

620. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Alor IV itu permohonan pada saat tanggal 24 Mei, Yang Mulia.

621. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu masih Anda gunakan atau tidak?

622. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Tidak sama sekali. Yang kami bacakan sekarang (...)

623. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Berarti Anda (...)

624. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Itu tanggal 31 Mei, sebagaimana kami ubah permohonan pada tanggal 24 Mei.

625. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Perlu Anda tegaskan, berarti Dapil Alor IV Anda tarik?

626. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Tarik, Yang Mulia.

627. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, mohon (...)

628. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Kami fokus ke ... kami fokus ke Dapil I Flores Timur, Yang Mulia.

629. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi sekali lagi, saya ulangi, Dapil Alor IV sudah Anda tarik, ya?

630. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Oke, Yang Mulia.

631. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak usah pakai oke, baik, gitu.

632. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Oh, baik, Yang Mulia. Terima kasih.
Kami lanjutkan, Yang Mulia.

633. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan!

634. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Oke, terima kasih.

Kemudian kami melakukan laporan kemudian ke Bawaslu terkait dengan laporan masyarakat tersebut, Yang Mulia. Ternyata di ... di TPS 1 sama 4 itu, pada saat dilakukan perhitungan suara, itu anggota KPPS nya melakukan perhitungan suara itu pada pukul 02.00 WITA malam, Yang Mulia. Jadi dilakukan perhitungan itu, pada saat kondisi fisik saksi dari partai kami maupun saksi dari partai-partai lain itu mengalami apa namanya ... kesehatan artinya mengantuk, gitu bahasa ini nya mengantuk dan seterusnya, Yang Mulia. Sehingga memengaruhi kefokusannya atau ketelitian dari saksi kami dalam mendengar atau melihat pada saat dilakukan perhitungan ... perhitungan suara tersebut itu dilakukan pukul 02.00 WITA malam.

Kemudian Yang Mulia, pada saat dilakukan perhitungan suara tersebut, itu KPPS membacakan surat suara itu tidak membacakan nama caleg, tapi langsung membacakan nomor urut caleg sama partai, jadi tidak membacakan nama. Sehingga saksi kami Pemohon, mengalami kebingungan dalam mencatat apa namanya ... perhitungan surat suara yang dibacakan oleh KPPS.

Hal ini sebagaimana kami jelaskan dalam posita kami di poin 10, Yang Mulia. Itu jelas kami jelaskan di situ. Sehingga saksi kami atas

nama Emanuel Diaz dan Vincensius Suban Ola apa namanya ... melakukan keberatan soal itu tapi dilanjutkan. Sehingga ini kami laporkan ke Bawaslu provinsi ... mohon maaf Bawaslu Kabupaten Flores (...)

635. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar, Mas. Sebentar, jangan diteruskan dulu, ya.

636. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Oke, Yang Mulia.

637. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya ulangi lagi, nanti Anda menyebutkannya supaya mudah bagi Termohon, Pihak Terkait untuk menanggapi juga.

638. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Oke, Yang Mulia.

639. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Posita Nomor 10 itu, Anda tidak ada. Yang ada itu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sekarang Anda baca yang mana nih, huruf E, ya?

640. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia, betul.

641. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi jangan digunakan angka kalau di sini, huruf, ya.

642. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya.

643. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diulangi lagi!

644. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, jadi intinya sih di apa ini, Yang Mulia ... di ... di ... TPS itu, waktu pada saat dibacakan, itu pihak KPPS atau penyelenggara Pihak Termohon, itu tidak apa namanya ... tidak menyebutkan nama dari caleg peserta pemilu.

645. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di TPS mana itu, TPS 1 dan TPS (...)

646. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

TPS 1 dan 4, Yang Mulia.

647. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

TPS 1 dan 4 itu, ya?

648. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia.

649. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang pukul 02.00 WITA dini hari tadi?

650. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, betul, Yang Mulia.

651. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di huruf E, ya?

652. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia, benar.

Oke, itu saja, Yang Mulia, yang ingin kami sampaikan. Kemudian petitum kami, Yang Mulia. Sebelum Yang Mulia ... kami membacakan petitum kami ingin mengoreksi untuk petitum nomor 5, Yang Mulia, ini menyangkut dengan hak ... hal-hal yang sangat substansial di kemudian hari. Di situ dalam poin 5, kami jelaskan untuk memerintahkan KPUD Kabupaten Flores Timur untuk segera melakukan penetapan perhitungan. Awalnya kami tulis *perhitungan*, kami ingin mengoreksi menjadi *pemungutan*, Yang Mulia. Jadi, ini biar direnvoi. Mohon izin untuk direnvoi, Yang Mulia.

653. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang mana yang Anda maksud itu? Petitum nomor berapa itu?

654. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Nomor 5, Yang Mulia.

655. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nomor 5? Saya bacakan, ya.

656. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Oke, Yang Mulia.

657. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nomor 5 itu adalah Petitumnya menetapkan pemungutan suara ulang atau PSU di semua TPS Dapil I Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

658. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, betul.

659. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu, bunyinya begitu?

660. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia.

661. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, Anda tidak bisa kalau Petitum itu sembarangan, kemudian minta direnvoi hal-hal yang sangat substansial.

662. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia.

663. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi kalau sudah begini, ya, begini Petitumnya.

664. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

665. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Betul seperti begini Petitumnya? Silakan kalau dibacakan lagi Petitum yang lain.

666. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor sekian-sekian, dianggap dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur sebagai pemenang perolehan kursi keempat dari keseluruhan 4 kursi yang berada di Dapil I Kabupaten Flores Timur.
4. Memerintahkan Termohon ... kepada Termohon KPUD Kabupaten Flores Timur untuk menetapkan perolehan suara yang benar milik Partai Golkar, yaitu 1.981 dan bukan sebesar 2.018 suara. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

667. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu, Petitum yang Anda bacakan itu tidak ada di dalam permohonan tanggal 31 Mei, semuanya. Beda ini, sudah beda ini. Ya, yang termasuk angka 3 tadi.

Coba Anda baca yang tanggal 31 Mei, Petitumnya!

668. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Petitum tanggal 31 Mei.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kemudian,
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor (...)

669. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dan seterusnya.

670. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Dan seterusnya, ya.

671. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, ketiga?

672. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon (...)

673. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Beda ini, ya?

674. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Izin, Yang Mulia.

675. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini yang Petitem tanggal yang terakhir?

676. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Tanggal 31 Mei, Yang Mulia.

677. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini?

678. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia, yang (...)

679. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bunyinya di sini, "Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur sebagai berikut." Itu? Apa ada lagi yang lain?

680. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Sepertinya, tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada yang lain, Yang Mulia. Maksudnya yang kami bacakan ini sesuai dengan apa yang kami (...)

681. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini yang ada di meja Mahkamah, lho ini.

682. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia.

683. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi saya bacakan di sini, kemudian 31(...)

684. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Kalau begitu, begini. Izin, Yang Mulia, mohon maaf, sebelum dibacakan. Kami Petitumnya sesuai dengan yang ada di Meja Mahkamah Konstitusi saja, Yang Mulia.

685. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya sudah kalau begitu. Sudah diperoleh ... diperoleh oleh Para Termohon, semua? Yang tanggal 31 Mei?

Anda sudah punya ini ... bukti-buktinya sudah lengkap?

686. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Insya Allah sudah lengkap, Yang Mulia.

687. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Keberatan sudah dilakukan?

688. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Keberatan sudah pernah dilakukan, Yang Mulia, pada saat dilakukan rapat untuk penetapan hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten, Yang Mulia.

689. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah disampaikan semua sebagai bukti?

690. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Sudah disampaikan semuanya. Ada buktinya, Yang Mulia. Insya Allah.

691. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Yang Mulia?

692. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQAM

Majelis? Izinkan? Ya, dari Termohon.

693. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan.

694. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQAM

Ya, jadi mohon ditegaskan lagi. Jadi yang permohonan perbaikan tanggal 31 itu ada 4 Petitum ... eh ... 5 Petitum, kemudian ditambah atau ex aequo et bono tadi? Betul hanya itu saja?

695. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, betul, betul.

696. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQAM

Oke, terima kasih. Jadi, ini yang akan kami tanggapi.

697. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, sekali lagi yang dipakai itu adalah yang terkait dengan permohonan 31 Mei yang tadi sudah ditegaskan.

Kemudian Dapil Alor IV sudah dicabut. Jadi, tinggal hanya Dapil Flores I saja. Begitu, ya?

698. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya. Betul, Yang Mulia.

699. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya kira begitu. Yang Mulia?

700. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saudara belum memasukan bukti fisiknya, ya? Cuma daftarnya saja?

701. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Hari ini kita masukin. Kebetulan ada, Yang Mulia.

702. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, hari ini. Katanya sudah. Ini cuma daftar bukti, gitu kok.

703. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Sebelumnya, Yang Mulia, kami karena keterbatasan akses dari (...)

704. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lha, ya, gimana? Kita keterbatasan memutus, berarti tolak saja langsung kan?

705. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Izinkan kami untuk melengkapi.

706. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Gimana itu?

707. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Izinkan kami, Yang Mulia, untuk melengkapi ... apa namanya (...)

708. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang fair dong. Tadi Anda katakan ... Anda sudah buat ... ada bukti. Sekarang ternyata setelah kita cek, hanya ada daftar bukti. Bukti fisiknya belum ada, tapi fair, gitu lho, katakan.

709. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Maksud kami, ada itu ... memang ada, tapi fisiknya memang belum, kami ini karena keterbatasan akses dari NTT, Yang Mulia, ke sini, Yang Mulia.

710. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak. Kalau begitu, pada waktu ditanya oleh Prof. Enny, Yang Mulia, Saudara mengatakan buktinya sudah ada.

711. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Mohon maaf, Yang Mulia.

712. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lha, kita kan ... hanya daftar, kan.

713. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Mohon maaf, Yang Mulia.

714. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nanti orang semuanya mengetahui, Anda sudah mengatakan sudah ada buktinya.

715. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Mohon maaf, kami koreksi ucapan sebelumnya, Yang Mulia.

716. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang benar, gitu lho.

717. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia.

718. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena ini disaksikan oleh banyak orang, terbuka untuk umum.

719. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia.

720. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Hanya ada daftar bukti.

721. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia.

722. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bukti fisik tidak ada, begitu. Betul, kan?

723. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Bukti fisiknya ada, Yang Mulia.

724. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lho, mana?

725. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ada sekarang, Yang Mulia.

726. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang saya tanya harus sudah diserahkan ke Mahkamah, kan?

727. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia.

728. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Coba sekarang, Para Pemohon yang lain, buktinya sudah diserahkan ke Mahkamah belum? Sudah, kan?

729. KUASA HUKUM PEMOHON:

Sudah, Yang Mulia.

730. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah. Lha Anda gimana? Ada tapi kalau di rumah, ya bawa pulang saja tidak udah diserahkan ke sini.

731. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Izin, Yang Mulia. Tapi (...)

732. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Anda berbelit-belit gitu kok dari tadi.

733. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Bukan, Yang Mulia. Maksud kami (...)

734. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bukan. Anda berbelit-belit.

735. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia. Mohon maaf.

736. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Serahkan sekarang, buktinya mana itu?

737. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ada.

738. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah dileges belum buktinya?

739. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Sudah, Yang Mulia.

740. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena bukti ini harus diverifikasi dan disahkan. Kalau yang lain sudah ada di sini, sudah dileges, sudah diverifikasi, tinggal disahkan dalam persidangan ini. Kenapa baru diserahkan sekarang? Itu kan mempersulit persidangan Saudara.

741. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Kami mohon maaf, Yang Mulia.

742. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk Partai Garuda buktinya sedang diverifikasi.

743. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Izin, Yang Mulia? Sebelum ini, dilanjutkan. Yang Mulia, kami mohon untuk di (...)

744. KETUA: ANWAR USMAN

Siapa ini?

745. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Dari Partai Garuda, Yang Mulia. Masih dari Partai Garuda.

746. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, iya.

747. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Yang Mulia, kami insya Allah masih mau menambahkan bukti baru, Yang Mulia. Insya Allah kalau ... kalau diizinkan kami ingin menambahkan bukti baru, Yang Mulia.

748. KETUA: ANWAR USMAN

Ada enggak sekarang?

749. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Mungkin besok baru kami daftarkan, Yang Mulia. Sudah ada tapi besok baru kami daftarkan. Jika diizinkan, Yang Mulia.

750. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau sudah ada, kenapa harus tunggu besok? Kalau ada sekarang.

751. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Kami belum leges, Yang Mulia. Belum dileges karena buktinya sangat banyak jadi kami belum leges.

752. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi begini, Pemohon, ya? Kita memperlakukan persidangan ini sama untuk semuanya, ya. Kemarin pada sidang yang pertama sudah ditentukan, sebelum akhir persidangan itu akan disahkan bukti yang sudah diverifikasi. Kalau masih ada tambahan bukti, diserahkan sejak awal untuk diverifikasi. Sehingga, bukti yang akan disampaikan setelah persidangan selesai untuk Pemohon sudah enggak ada. Sedangkan, untuk Termohon dan Pihak Terkait itu persidangannya besok hari Selasa pada minggu depan, buktinya juga paling lambat pada akhir persidangan pada hari Selasa itu. Nah, kalau Saudara mundur besok, kapan mengesahkannya lagi? Itu kan repot, ya. Jadi tidak bisa Anda menyerahkan besok. Apalagi Saudara menyerahkan bukti yang mestinya sudah harus diserahkan pada waktu menyerahkan permohonan baru sampai sekarang, ini kan coba, baru diverifikasi. Sehingga Ketua enggak bisa mengesahkan sekarang. Ini terpaksa harus mundur, padahal kita persidangan harus berjalan terus. Hanya menunggu Anda saja untuk melakukan verifikasi sekarang ini, ya? Jadi Anda harus tahu persis mekanisme proses yang harus dilaksanakan. Jadi ini tidak hanya menangani perkara Anda saja. Menangani perkara jumlahnya ratusan, sehingga proses itu harus tetap jalan, ya?

753. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Oke, Yang Mulia.

754. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Ketua.

755. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, ini masih ke ... apa namanya ... Garuda, ya? Jadi begini, Mas. Anda sudah menyampaikan daftar bukti Pemohon, betul ya?

756. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Betul, Yang Mulia.

757. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Hanya setelah kami cek, daftar bukti dengan bukti fisik itu berbeda, sehingga sangat sulit untuk diverifikasi kalau begini. Seperti di sini Anda menyebutkan di bukti P-4 itu ... itu beda, yang ada adalah DB-1 buktinya. Jadi kesulitan bagi kami untuk memverifikasi. Bisa ndak ini Anda kerjakan cepat gitu untuk ... ini karena ini kita harus (...)

758. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Insyallah bisa, Yang Mulia. Insyallah bisa.

759. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Karena daftarnya ini penting sekali untuk memverifikasi.

760. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia. Jadi begini, Yang Mulia. Ini usulan kami saja. Nanti dipertimbangkan, Yang Mulia. Kami punya daftar bukti baru yang sesuai dengan ... apa namanya ... bukti yang kami baru masukan tadi, Yang Mulia. Jika diizinkan, mohon ditetapkan daftar bukti baru ini, Yang Mulia. Kami serahkan sekarang, Yang Mulia.

761. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan! Itu perbaikan, ya? Yang daftar bukti tadi?

762. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Betul, Yang Mulia. Untuk menyesuaikan bukti yang tadi kami kasih, Yang Mulia.

763. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kenapa enggak sekalian tadi? Ya, silakan!

764. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kok kayaknya pelit sekali sih Saudara? Nyerahkan bukti saja baru sekarang. Padahal sekarang ada perubahan di daftarnya, sekarang daftarnya ternyata beda, sekarang baru diserahkan lagi. Gimana sih? Ini bisa dipotong Anda sama Prinsipal.

765. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Mohon maaf, Yang Mulia.

766. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, ya. Kita sahkan dulu perkara lain untuk buktinya. Tapi sebelumnya, ini mohon klarifikasi atau konfirmasi untuk Pihak Terkait, apakah sudah ada Surat Permohonan sebagai Pihak Terkait? Ya?

767. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDY SYAMSUL BAHRI (PPP)

Kami Pihak Terkait sudah ada surat permohonan dan sekalian juga dengan keterangan Pihak Terkait kami sudah daftarkan semuanya. Terima kasih, Yang Mulia.

768. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, baik. Yang lain juga begitu?

769. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN (PDIP)

Sudah, Yang Mulia, dari PDI Perjuangan.

770. KETUA: ANWAR USMAN

PDIP. Golkar?

771. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERDIKA SUKMA NEGARA (GOLKAR)

Sudah, Yang Mulia.

772. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya.

Ya, kita sahkan untuk Partai PAN, ya. Nomor 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bukti P-1 sampai dengan P-30, benar?

773. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PAN)

Benar, Yang Mulia.

774. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara Nomor 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PBB, Bukti P-1 sampai dengan P14E. Dengan catatan, dalam daftar bukti tercantum P-1 sampai dengan P-16. Tetapi, pada alat bukti yang disertakan hanya P-1 sampai dengan P-14E. Ini gimana ini?

775. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Sampai P-14E saja, Yang Mulia.

776. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kan ada di daftarnya itu P-1 sampai dengan P-16.

777. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Ya.

778. KETUA: ANWAR USMAN

Tapi dibukti fisiknya itu P-1 sampai dengan P-14E.

779. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

He eh. Yang (...)

780. KETUA: ANWAR USMAN

Salah tulis atau bagaimana?

781. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Sebenarnya kami mau mengajukan, tapi karena sudah telat, ya sudah enggak apa-apa, Yang Mulia, mohon dicoret saja.

782. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, dicoret saja?

783. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AFRIZAL (PBB)

Siap.

784. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, yang ada ... saya ulangi, P-1 sampai dengan P14-E. Ya, gitu ya? Baik. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian Perkara Nomor 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Gerindra. Bukti untuk Dapil NTT II, P-2 DPR RI, NTT II-1 sampai dengan P-2 DPR RI NTT II-42. Dengan catatan, untuk Dapil Kupang IV tidak mengajukan bukti atau ditarik pada sidang hari ini. Ya, benar?

785. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI ANTONIUS (GERINDRA)

Benar, Yang Mulia.

786. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara Nomor 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Hanura, Bukti P-1 sampai dengan P-10?

787. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Benar, Yang Mulia.

788. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

789. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Izin, Yang Mulia.

790. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

791. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Kita sebenarnya mau menambahkan 1 bukti lagi, Yang Mulia. Cuma buktinya udah ada ... cuma tambahan ... daftar bukti tambahannya kita belum buat, Yang Mulia. Bisa minta tolong dimasukkan enggak, Yang Mulia? Cuma 1. Sudah dileges, Yang Mulia.

792. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya. Ya sudah. Silakan.

Ya, baik. Kita lanjut dulu untuk Perkara Nomor 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Hanura.

793. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Siap, Majelis Yang Mulia.

794. KETUA: ANWAR USMAN

Bukti P-1 sampai dengan P-10.

795. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

P-10, Yang Mulia.

796. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, benar?

797. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Benar, Yang Mulia.

798. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

799. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Eh ... yang tambahan tadi yang P-11, Yang Mulia.

800. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti kita sahkan belakangan.

801. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Siap, Yang Mulia.

802. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah, Pak Ketua. Yang Berkarya.

803. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Verifikasi sebentar, Pak.

804. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk Berkarya ini, setelah ... anu ... paraf sih, kita bantulah, ya.
Ternyata begini, setelah kita cek, untuk bukti Saudara itu di dalam bukti ... daftar bukti hanya ada 13. Ternyata bukti fisiknya yang diajukan 14. Yang satu berupa DB2-KPU masih tetap dijadikan bukti atau mau ditarik atau ditambahkan? Ada bukti P-14. Ini di daftar bukti Saudara hanya sampai bukti P-13.

805. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Izin, Yang Mulia. Berkarya apa Garuda, Yang Mulia?

806. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Garuda, sori, Garuda.

807. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia. Sampai P-14, Yang Mulia.

808. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

P-14.

809. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Yang Mulia, izin. Kami ada keslip untuk bukti P-6 nya di atas Situng yang kami akses.

810. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

P-6 nya.

811. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia. Ini keslip di sini, Yang Mulia. Mohon maaf baru kami ini.

812. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

P-6 nya sudah ada.

813. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Oh, sudah ada, Yang Mulia?

814. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, itu diserahkan.

815. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia.

816. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi Anda sekarang menambahkan bukti P-14, ya?

817. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia. Mohon ditambahkan.

818. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini saya tulis, berarti saya tambahi daftar Anda enggak lengkap.

819. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia.

820. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang ditambahi ada bukti P-14. Bukti fisiknya namanya DP2-KPU. Ya, betul?

821. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia.

822. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus kemudian begini, bukti 11 di dalam daftar Anda hanya menulis bukti foto. Isinya apa? Fisiknya apa sebetulnya?

823. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Eh, di fotokopi ada mungkin, Yang Mulia. Keselip di fotokopi. Mohon mohon ditemui. Kalau memang enggak ada (...)

824. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, kalau kita di sini bukti fisiknya ada, bukti foto dan video, betul enggak? Coba ini, ini, coba, mana?

Ini P-11 kemudian ditambahkan ini.

825. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia.

826. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi foto ... kalau yang foto kan ini.

827. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia.

828. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, Saudara menambahkan ini.

829. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia.

830. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Video, betul enggak?

831. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Betul, Yang Mulia.

832. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lha ya, kita ini betul kok, kamu tuh ... berarti di sini di daftar alat bukti disebut bukti P-11 adalah bukti foto ini.

833. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, Yang Mulia.

834. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dan bukti video yang ada di-flashdisk, betul?

835. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Betul, Yang Mulia.

836. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, sekarang saya tambahkan video, ya?

837. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

838. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, begitu gampang kok.

839. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Terima kasih, Yang Mulia.

840. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah pernah beracara di MK?

841. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Baru pertama ini.

842. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, oke. Ya, harus di ... anu ... biar pintar. Saya ini sifat dosen saya yang keluar sekarang ini.

843. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Alhamdulillah.

844. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi bukti Saudara sampai bukti P-14, ya? Betul, ya?
Oke, terima kasih, Yang Mulia.

845. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Ya, kita sahkan dulu untuk tambahan bukti P-11 dari Partai Hanura, ya?

846. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Ya, Yang Mulia.

847. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik sudah diverifikasi, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

848. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA (HANURA)

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

849. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian terakhir untuk Partai Garuda, P-1 sampai dengan P-14, benar ya?

850. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN (GARUDA)

Benar, Yang Mulia.

851. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, ada tambahan dari Yang Mulia. Silakan.

852. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya ke Pihak Terkait, ya, PPP. PPP tadi sudah ditanyakan Yang Mulia Pak Ketua bahwa sudah mengajukan surat permohonan, betul? Yang ada di meja Hakim ini adalah keterangan dari Pihak Terkait saja.

Ini saya perlu bacakan Pasal 23, ya, PMK bahwa partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai keterangan Pihak Terkait paling lama 2 hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan.

Kemudian ayat (2), "Permohonan sebagai Pihak Terkait dan keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP partai politik peserta pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain."

Yang sudah dimasukkan oleh PPP ini adalah keterangan saja Pihak Terkait yang tanda tangan adalah kuasa hukum. Sekarang permohonannya bisa ... sudah bisa diserahkan?

853. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDI SYAMSUL BAHRI (PPP)

Mohon maaf, saya lupa bawa, Yang Mulia. Ya, mohon maaf.

854. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan, PPP.

855. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDI SYAMSUL BAHRI (PPP)

Mohon maaf, saya lup ... masih ... lupa bawa, Yang Mulia. Betul-betul lupa bawa.

856. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi sudah ada suratnya?

857. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDI SYAMSUL BAHRI (PPP)

Sudah ada, Yang Mulia.

858. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ini persoalannya adalah ini harus diajukan 2 hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan, tidak hanya sekadar keterangan saja, begitu. Dan ini juga berlaku buat yang lain ini, Pihak Terkait untuk Golkar itu juga belum menyerahkan, ya. Untuk Perkara Dapil NTT II, ya. Itu juga belum menyerahkan, yang sudah ada baru keterangan Pihak Terkait yang ditandatangani oleh kuasa hukum.

Jadi kita harus menggunakan ketentuan dengan sebaik mungkin karena menyangkut Hukum Acara kalau kemudian tidak diajukan, itu berarti ya memang kemudian tidak mengajukan sebetulnya permohonan itu.

Ini tolong diperhatikan, ya!

859. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, sudah selesai, ya. Sekarang mohon diperhatikan.

860. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang Mulia.

861. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Pak Ali.

862. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dari Termohon kami belum menerima DAB dari Pemohon. Jadi mohon izin agar kami bisa mendapatkan DAB dan bisa inzage di bawah. Terima kasih, Yang Mulia.

863. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya. Silakan, nanti habis penutupan sidang.

Untuk sidang selanjutnya, untuk nomor perkara ini, ditunda hari Selasa, tolong dicatat, tanggal 16 Juli 2019, pukul 08.00 WIB dengan agenda, mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti ... alat bukti dari Termohon tentunya, Pihak Terkait.

Kemudian, ada catatan. Pemberitahuan ini, artinya pengumuman tadi, ya, berlaku sebagai panggilan resmi. Jadi, tidak ada lagi pemberitahuan melalui surat.

Kemudian, untuk catatan bahwa perbaikan jawaban Termohon, keterangan keterkaitan, dan keterangan Bawaslu diajukan paling lambat hari Jumat, 12 Juli 2019, pukul 12.00 WIB. Ya, tolong dicatat. Kemudian, tambahan alat bukti bagi Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu diserahkan paling lambat sebelum sidang hari Selasa nanti selesai. Jadi, masih bisa, ya, seperti Pemohon juga tadi.

Jadi, sudah jelas, ya. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu?

864. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: ALI NURDIN

Jelas, Yang Mulia.

865. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, baik. Sudah tidak ada lagi, ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.57 WIB

Jakarta, 10 Juli 2019

Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001